

Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Risiko Tour Domestik serta Haji-Umrah di Indonesia

Nabilla Deswita Forsia¹, Hidayah Sapitri², Miranda³, Muhammad Zamzam⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Indonesia

Corresponding Author: nabilladswtf@gmail.com^{1*}, hidayasapitri29@gmail.com²,
mirandaaa1600@gmail.com³, zamzam.muhammad.zm@gmail.com⁴

Info Artikel

Received: 18 Maret 2026

Revised : 20 Maret 2026

Accepted: 13 April 2026

Published: 26 April 2026

Keywords:

Financial Management,
Domestic Tour, Hajj and
Umrah, Risk Management,
Transparency.

Kata Kunci:

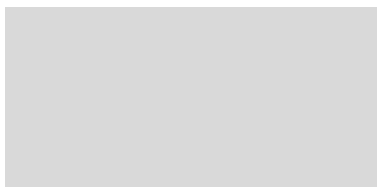
Pengelolaan Keuangan, Tour
Domestik, Haji dan Umrah,
Manajemen Risiko,
Transparansi.

Abstract

This study analyzes financial management in the domestic tour and Hajj-Umrah industry in Indonesia, focusing on the basic concepts of financial management, financial risk mitigation strategies, and the implementation of transparency and accountability principles. Using a descriptive qualitative approach based on literature review, this study examines relevant literature, regulations, and research results within the 2021-2025 period. The results show that systematic financial management, encompassing planning, implementation, administration, reporting, and accountability, is crucial for cash flow stability. In domestic tours, recording still predominantly uses manual Microsoft Excel, while Hajj-Umrah fund management is strictly regulated by Law Number 34 of 2014 with Sharia principles and BPK oversight. Structured risk management against cancellations, payment delays, and price changes proves effective in minimizing financial disruptions. Transparency and accountability serve as moral and social foundations in building public trust. This study recommends digitalizing recording systems and tightening down-payment policies to enhance efficiency and consumer trust.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengelolaan keuangan pada industri tour domestik dan haji-umrah di Indonesia, dengan fokus pada konsep dasar pengelolaan keuangan, strategi mitigasi risiko finansial, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengkaji literatur, regulasi, dan hasil riset terkait dalam rentang waktu 2021-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang sistematis meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban sangat krusial untuk stabilitas arus kas. Pada tour domestik, pencatatan masih dominan menggunakan Microsoft Excel secara manual, sementara pengelolaan dana haji-umrah diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dengan prinsip syariah dan pengawasan BPK. Manajemen risiko terstruktur terhadap pembatalan, keterlambatan pembayaran, dan perubahan harga terbukti efektif meminimalkan gangguan finansial. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi moral dan sosial dalam membangun kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan digitalisasi sistem pencatatan dan pengetatan



kebijakan uang muka untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan konsumen.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Industri pariwisata di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, khususnya pada sektor perjalanan domestik dan ibadah haji-umrah. Fenomena ini tidak terlepas dari meningkatnya mobilitas masyarakat serta kesadaran spiritual yang mendorong tingginya minat masyarakat Muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji dan umrah (Hakim, 2025). Perjalanan ibadah memiliki karakteristik yang berbeda dengan wisata konvensional karena melibatkan aspek spiritual yang mendalam, durasi yang panjang, serta biaya operasional yang tidak sedikit. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan menjadi komponen krusial yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan perjalanan, baik dari sisi penyedia jasa maupun kepuasan konsumen (Nazaruddin, 2019).

Salah satu tantangan utama dalam industri tour adalah kompleksitas pengelolaan dana yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari peserta perjalanan, vendor akomodasi, maskapai penerbangan, hingga otoritas keagamaan. Pada tour domestik, pengelolaan keuangan mencakup perencanaan anggaran yang realistis, pencatatan transaksi yang akurat, serta pelaporan keuangan yang transparan (Dhio et al., 2024). Namun, masih banyak biro perjalanan yang mengandalkan pencatatan manual menggunakan Microsoft Excel, yang berisiko menimbulkan kesalahan administrasi dan keterlambatan pelaporan (Supriastuti & Nugroho, 2025). Hal ini menunjukkan perlunya digitalisasi sistem pencatatan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data.

Sementara itu, pengelolaan dana haji dan umrah memiliki regulasi yang lebih ketat mengingat besarnya nilai dana yang dikelola dan jumlah jemaah yang terlibat. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengamanatkan bahwa pengelolaan dana haji harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, non-profit, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas (Ulya, 2019). Lembaga seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam mengawal pengelolaan dana umat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Anas, 2025). Namun, berbagai kasus penyalahgunaan dana di masa lalu menjadi pengingat bahwa pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi masih memerlukan perhatian serius (Rokhmah et al., 2023).

Selain aspek regulasi, industri tour juga menghadapi risiko finansial yang beragam, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Risiko pembatalan oleh peserta, keterlambatan pembayaran, fluktuasi nilai tukar mata uang asing, serta perubahan harga dari vendor merupakan beberapa contoh ketidakpastian yang dapat mengganggu arus kas perusahaan (Hidayah, 2022; Nuraisi, 2025). Oleh karena itu, manajemen risiko yang terstruktur menjadi keharusan bagi biro perjalanan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap operasional. Strategi mitigasi seperti kebijakan uang muka yang tegas, tenggat waktu pembayaran yang jelas, dan mekanisme pengembalian dana yang transparan terbukti efektif dalam menjaga stabilitas keuangan (Tahulending & Rondonuwu, 2022).

Lebih lanjut, prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari tata kelola keuangan yang baik. Transparansi mengharuskan adanya keterbukaan informasi kepada publik mengenai penggunaan dana, sementara akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban yang jelas dari pengelola atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil (Astawa & Dewi, 2021; Seputro & Mustafida, 2024). Kedua prinsip ini menjadi fondasi moral dan sosial yang sangat penting, terutama dalam pengelolaan dana umat yang memiliki dimensi keagamaan dan kepercayaan publik yang tinggi. Jemaah haji dan umrah mempercayakan dananya kepada biro perjalanan, sehingga pengelola wajib menjaga amanah tersebut dengan profesionalisme dan integritas (Widhiastuti, 2024).

Keberhasilan pengelolaan keuangan juga bergantung pada kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi keuangan, pemerintah, dan badan keagamaan. Kerjasama ini diperlukan untuk memastikan kelancaran pendanaan dan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, terutama di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan kebijakan pemerintah (Rokhmah et al., 2023). Selain itu, peningkatan kompetensi pengelola wisata melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel (Mamangkey et al., 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan pada industri tour domestik dan luar negeri (haji/umrah) dengan fokus pada tiga aspek utama: konsep dasar pengelolaan keuangan, strategi mitigasi risiko finansial, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu manajemen keuangan di sektor pariwisata, sekaligus

memberikan rekomendasi praktis bagi para pelaku industri dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan terpercaya. Dengan pengelolaan keuangan yang sistematis, transparan, dan akuntabel, industri tour dapat terus tumbuh dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam memfasilitasi perjalanan ibadah yang merupakan kebutuhan spiritual yang sangat penting bagi umat Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai pengelolaan keuangan pada industri tour domestik maupun luar negeri seperti haji dan umrah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara holistik dan kontekstual, serta memahami makna di balik praktik pengelolaan keuangan yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2019). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang manajemen anggaran bisnis, regulasi pengelolaan dana haji, serta manajemen risiko pada agen perjalanan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, maupun publikasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Zed, 2018). Sumber data sekunder dalam artikel ini diperoleh dari buku teks manajemen keuangan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, serta artikel jurnal ilmiah terkait yang dipublikasikan dalam rentang waktu lima tahun terakhir antara tahun 2021-2025. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada pertimbangan bahwa literatur yang relevan dan terkini akan memberikan gambaran yang akurat mengenai praktik pengelolaan keuangan industri tour saat ini (Creswell & Creswell, 2018).

Proses analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi konsep dasar penyusunan anggaran dan pencatatan transaksi pada industri pariwisata, menganalisis perbedaan alur operasional keuangan antara tour domestik dan tour religi, serta memetakan jenis-jenis risiko finansial beserta strategi mitigasi yang dapat diterapkan oleh biro perjalanan. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan, dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan (Miles et al., 2019). Selain itu, analisis juga difokuskan pada pengkajian prinsip

transparansi dan keterbukaan laporan keuangan sebagai fondasi tata kelola dana umat yang amanah.

Guna memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik *cross-checking* dan triangulasi sumber dengan cara menyinkronkan data regulasi resmi pemerintah dengan teori-teori manajemen keuangan serta hasil riset terdahulu dari referensi akademik yang kredibel. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk menjamin keakuratan dan keandalan data (Denzin & Lincoln, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh perspektif yang komprehensif dan meminimalkan bias yang mungkin muncul dari ketergantungan pada satu jenis sumber data saja.

Untuk mendukung kedalaman analisis, penelitian ini juga mengkaji berbagai studi kasus dan laporan empiris dari biro perjalanan yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan laporan penelitian. Kajian ini mencakup aspek operasional tour domestik, manajemen risiko keuangan, serta implementasi regulasi haji dan umrah di Indonesia (Hidayah, 2022; Nuraisi, 2025). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu manajemen keuangan di sektor pariwisata, khususnya dalam konteks penyelenggaraan tour domestik dan perjalanan ibadah haji-umrah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan dalam Industri Tour

Salah satu komponen yang sangat penting dalam keberlangsungan bisnis, termasuk industri tour, adalah pengelolaan keuangan. Dalam industri tour, pengelolaan keuangan mencakup perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan secara terukur dan sistematis. Hal ini diperlukan agar operasi bisnis dapat berjalan dengan baik, efisien, dan berkelanjutan (Dhio et al., 2024). Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengambilan keputusan bisnis (Nurhasanah & Syahputra, 2024).

Penyusunan anggaran yang realistis adalah dasar penting dalam menentukan harga paket wisata serta alat untuk mencegah pengeluaran yang tidak terkontrol. Dengan anggaran yang terencana dengan baik, perusahaan bisa menjaga keuangan tetap stabil dan mengurangi risiko kerugian akibat ketidaksesuaian antara pendapatan dan biaya operasional (Tahulending & Rondonuwu, 2022). Anggaran yang komprehensif mencakup seluruh komponen biaya, mulai dari

biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga biaya tak terduga yang mungkin timbul selama perjalanan.

Selain itu, pencatatan setiap transaksi keuangan seperti pembayaran uang muka peserta dan pembayaran kepada vendor harus dilakukan dengan tepat dan konsisten. Meskipun masih terdapat usaha yang menggunakan cara manual, pencatatan yang rapi ini sangat penting untuk menghasilkan laporan laba rugi yang jelas sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja (Supriastuti & Nugroho, 2025). Pencatatan yang akurat memungkinkan perusahaan untuk memantau arus kas secara real-time dan mengidentifikasi potensi masalah keuangan sebelum menjadi krisis.

Industri pariwisata juga harus mempunyai kontrol risiko yang kuat terhadap hal-hal yang tidak pasti, seperti pembatalan oleh peserta atau perubahan harga dari pihak lain. Perusahaan perlu menerapkan strategi pengurangan risiko yang tepat agar gangguan terhadap arus kas bisa diminimalkan (Hidayah, 2022). Manajemen risiko yang proaktif mencakup identifikasi risiko potensial, analisis dampaknya terhadap operasional, dan pengembangan rencana kontingensi untuk mengatasinya.

Pada akhirnya, pengelolaan keuangan yang disiplin akan memastikan bahwa operasional tetap berjalan di tengah kondisi pasar yang selalu berubah. Dengan kontrol risiko dan anggaran yang ketat, perusahaan pariwisata dapat bertahan dari fluktuasi musiman dan perubahan situasi eksternal (Widhiastuti, 2024). Disiplin keuangan juga menciptakan budaya organisasi yang menghargai efisiensi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Pengelolaan Keuangan pada Tour Domestik

Pengelolaan keuangan pada tour domestik adalah langkah terencana yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas finansial untuk menjamin kelangsungan dan keuntungan dari layanan wisata lokal. Pendapatan untuk perusahaan tour domestik diperoleh dari tiket pengunjung, akomodasi, penjualan makanan dan minuman, sewa kendaraan, biaya parkir, serta layanan tambahan lainnya (Dhio et al., 2024). Diversifikasi sumber pendapatan ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis layanan dan meningkatkan stabilitas keuangan.

Proses dimulai dengan pengaturan keuangan di mana perusahaan menetapkan sasaran pendapatan dan menganggarkan pengeluaran operasional (Tahulending & Rondonuwu, 2022), serta telah menyusun perencanaan keuangan dalam kegiatan bisnisnya (Widhiastuti, 2024). Perencanaan

yang matang mencakup proyeksi pendapatan berdasarkan tingkat okupansi dan permintaan pasar, serta alokasi biaya untuk berbagai kebutuhan operasional. Selanjutnya, pelaksanaan keuangan dilakukan dengan mengimplementasikan semua transaksi berdasarkan rencana yang telah disusun, apabila tujuan tidak tercapai, mereka akan merumuskan strategi untuk mengatasi masalah tersebut (Mamangkey et al., 2023).

Administrasi keuangan seringkali menerapkan metode pencatatan manual menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk mendokumentasikan setiap penerimaan dan pengeluaran secara terperinci, serta membuat rekap bulanan dan mingguan. Pelaporan keuangan meliputi penyusunan laporan laba rugi yang menggambarkan kinerja keuangan dari perusahaan perjalanan (Supriastuti & Nugroho, 2025). Laporan keuangan ini menjadi dasar evaluasi bagi manajemen untuk menilai efektivitas strategi bisnis dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Sementara itu, pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan dua kali dalam sebulan untuk mengecek semua pendapatan dan biaya dari usaha pariwisata (Dhio et al., 2024).

Pengelolaan keuangan yang efektif meliputi perencanaan, pengawasan, dan pelaporan yang akurat untuk memaksimalkan pendapatan serta mempertahankan standar pengelolaan tempat wisata. Diperlukan pengurangan biaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan menurunkan biaya operasional dalam usaha perjalanan domestik (Seputro & Mustafida, 2024). Efisiensi biaya dapat dicapai melalui negosiasi dengan vendor, optimalisasi rute perjalanan, dan pemanfaatan teknologi untuk mengotomatisasi proses administrasi.

Pengelolaan Keuangan pada Tour Haji dan Umrah

Sistem pengelolaan dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji pada pasal 1. Keuangan haji mencakup seluruh hak dan tanggung jawab pemerintah yang bisa dinilai dengan uang yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, serta segala aset dalam bentuk uang atau barang yang dapat dievaluasi secara finansial yang dihasilkan dari pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, termasuk hak yang berasal dari calon jamaah haji serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014).

Pengelolaan dana haji dilakukan dengan berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, non-profit, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas (Ulya, 2019). Prinsip syariah dalam pengelolaan dana haji mengharuskan seluruh transaksi dan investasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir. Pengelolaan keuangan haji

mencakup penerimaan berupa setoran BPIH/BPIH Khusus, manfaat finansial dari haji, dana efisiensi untuk penyelenggaraan ibadah haji, Dana Abadi Umat (DAU), dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sedangkan untuk pengeluaran, meliputi penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH, investasi keuangan haji, pengembalian setoran yang dibatalkan, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus kepada PIHK, pembayaran nilai manfaat, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam, serta pengambilan selisih saldo (Ulya, 2019). Pengelolaan yang komprehensif ini memerlukan sistem administrasi yang canggih dan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pengawas Haji (Anas, 2025).

Karakteristik unik dari pengelolaan dana haji adalah sifatnya yang non-profit dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Hal ini menuntut pengelola untuk mengutamakan kepentingan jemaah di atas kepentingan komersial, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi penyelenggaraan ibadah haji (Rokhmah et al., 2023). Regulasi yang ketat dan pengawasan yang berlapis diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana yang pernah terjadi di masa lalu.

Manajemen Risiko Keuangan dalam Penyelenggaraan Tour

Manajemen Risiko Keuangan dalam Penyelenggaraan Tour menjelaskan bagaimana perusahaan tour menemukan, menilai, dan mengatur risiko yang bisa mempengaruhi keuangan dan jalannya perjalanan. Dalam hal ini, risiko tidak hanya datang dari aspek operasional, tetapi juga dari sisi finansial, terutama ketika terjadi perubahan jadwal perjalanan, kesalahan dalam pemesanan tiket, pembatalan oleh pelanggan, keterlambatan dalam pembayaran, dan pengembalian dana (Hidayah, 2022; Nuraisi, 2025).

Tabel 2. Risiko Keuangan dan Strategi Mitigasi dalam Penyelenggaraan Tour

Jenis Risiko	Dampak Potensial	Strategi Mitigasi
Perubahan Jadwal Perjalanan	Agenda terganggu dan peserta tidak nyaman	Siapkan jadwal cadangan dan komunikasikan perubahan dengan cepat
Kesalahan Pemesanan Tiket	Keterlambatan, biaya tambahan, dan mengganggu kenyamanan	Cek ulang data (nama, tanggal, tujuan) sebelum konfirmasi tiket
Pembatalan oleh Pelanggan	Kerugian finansial dan merusak rencana perjalanan	Terapkan kebijakan pembatalan tegas dan wajibkan uang muka (DP)
Keterlambatan	Proses pemesanan terhambat dan	Tetapkan tenggat waktu (deadline) jelas dan

Jenis Risiko	Dampak Potensial	Strategi Mitigasi
Pembayaran Pelanggan	mengganggu arus kas	kirim pengingat berkala
Pengembalian Dana (Refund)	Pendapatan berkurang dan arus kas operasional tidak stabil	Buat kebijakan syarat & ketentuan refund yang transparan sejak awal

Manajemen risiko yang efektif memerlukan pendekatan sistematis yang mencakup identifikasi risiko, analisis dampak, evaluasi prioritas risiko, pengembangan strategi mitigasi, dan monitoring berkelanjutan (Hidayah, 2022). Perubahan jadwal perjalanan, misalnya, dapat diantisipasi dengan menyiapkan jadwal cadangan dan memastikan jalur komunikasi yang cepat dan efektif kepada peserta. Hal ini penting untuk meminimalkan ketidaknyamanan dan menjaga reputasi perusahaan.

Kesalahan pemesanan tiket merupakan risiko yang sering terjadi dan dapat menimbulkan biaya tambahan yang signifikan. Strategi mitigasi yang efektif adalah dengan melakukan verifikasi data secara berlapis sebelum konfirmasi tiket, termasuk pengecekan nama, tanggal, dan tujuan perjalanan (Nuraisi, 2025). Selain itu, pembatalan oleh pelanggan dapat diminimalkan dengan menerapkan kebijakan uang muka yang tegas dan mekanisme pembatalan yang jelas, sehingga perusahaan tidak menanggung kerugian penuh atas pembatalan yang terjadi (Tahulending & Rondonuwu, 2022).

Keterlambatan pembayaran pelanggan merupakan risiko yang mengganggu arus kas dan dapat menghambat proses pemesanan. Penetapan tenggat waktu yang jelas dan pengiriman pengingat berkala kepada pelanggan terbukti efektif dalam mendorong kepatuhan pembayaran (Mamangkey et al., 2023). Sementara itu, pengembalian dana (refund) memerlukan kebijakan yang transparan dan disosialisasikan sejak awal kepada pelanggan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari.

Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Fondasi Tata Kelola

Transparansi adalah jenis layanan yang disediakan oleh organisasi untuk masyarakat yang bersifat terbuka dan jujur, informasi yang bisa diakses dengan mudah oleh semua orang yang memerlukan informasi tersebut dan data yang disediakan dijelaskan dengan cara yang bisa dipahami oleh semua orang (Astawa & Dewi, 2021). Dalam konteks pengelolaan tour, transparansi mencakup keterbukaan informasi mengenai rincian biaya, mekanisme pembayaran, dan penggunaan dana. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan (Seputro & Mustafida, 2024).

Peran institusi keuangan dalam pendanaan untuk ibadah haji dan umrah sangat krusial, terutama di tengah perubahan yang terjadi. Keterjangkauan, kejelasan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Studi ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara institusi keuangan, pemerintah, dan badan keagamaan untuk menjamin kelancaran pendanaan ibadah haji dan umrah di masa depan (Rokhmah et al., 2023). Kolaborasi ini diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

Sebaliknya, akuntabilitas mengharuskan pengelola dana haji memiliki cara untuk bertanggung jawab yang jelas. Akuntabilitas tidak hanya terkait dengan hasil akhir, tetapi juga dengan bagaimana keputusan diambil, dana dikelola, dan digunakan. Pengelola dana haji perlu mampu menjelaskan dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil, termasuk jika ada kesalahan atau kerugian (Anas, 2025). Selain itu, menjadi akuntabel berarti ada pengawasan yang baik dari lembaga resmi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pengawas Haji, serta dari masyarakat dan media (Ulya, 2019).

Dengan kata lain, semakin jelas pengelolaan dana haji, semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelolanya. Kepercayaan publik merupakan aset tidak berwujud yang sangat berharga dalam industri tour, terutama pada segmen haji dan umrah yang melibatkan dana besar dan dimensi spiritual yang tinggi (Rokhmah et al., 2023). Selain itu, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya soal administrasi, tetapi juga merupakan dasar moral dan sosial untuk mengelola dana umat yang sangat penting. Oleh karena itu, kedua hal tersebut memastikan bahwa haji, yang merupakan ibadah yang sangat dinanti oleh umat Islam, harus dikelola dengan amanah dan profesional, sesuai dengan prinsip keadilan dan manfaat untuk semua (Widhiastuti, 2024).

Implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam praktiknya memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengelola perusahaan tour, regulator, hingga konsumen. Pendidikan dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak juga menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang baik (Seputro & Mustafida, 2024). Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel tidak hanya melindungi kepentingan konsumen, tetapi juga meningkatkan daya saing industri tour secara keseluruhan.

SIMPULAN

Pengelolaan keuangan dalam bidang tour merupakan fondasi penting yang mencakup perencanaan dana, pencatatan setiap transaksi, hingga pelaporan yang jelas dan pertanggungjawaban. Keberhasilan operasi, baik untuk perjalanan dalam negeri maupun yang bersifat religius seperti haji dan umrah, sangat tergantung pada penyusunan anggaran yang masuk akal dan disiplin dalam administrasi agar arus kas tetap stabil. Pada tour domestik, pencatatan keuangan masih banyak dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel, sementara pengelolaan dana haji dan umrah diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang mewajibkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pengawasan dari lembaga resmi seperti BPK.

Selain itu, adanya manajemen risiko yang baik sangat penting untuk menghadapi ketidakpastian pasar, misalnya pembatalan mendadak atau perubahan harga, sehingga bisnis tetap berjalan dengan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan walau situasi luar berubah. Strategi mitigasi seperti kebijakan uang muka yang tegas, tenggat waktu pembayaran yang jelas, dan mekanisme pengembalian dana yang transparan terbukti efektif dalam meminimalkan gangguan finansial.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi dasar moral dan sosial dalam pengelolaan dana umat yang sangat penting. Semakin jelas pengelolaan dana haji, semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelolanya. Kedua prinsip ini memastikan bahwa haji dan umrah, sebagai ibadah yang sangat dinanti oleh umat Islam, dikelola dengan amanah dan profesional sesuai dengan prinsip keadilan dan manfaat untuk semua. Dengan pengelolaan keuangan yang sistematis, transparan, dan akuntabel, industri tour dapat terus tumbuh dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, N. (2025). Antara harapan dan realita: Integrasi teknologi informasi dalam pelayanan administrasi haji untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*, 7(01), 244–259. <https://doi.org/10.53863/kst.v7i01.1602>
- Astawa, N. P., & Dewi, Y. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan objek wisata Aling-Aling Waterfall sebagai pendapatan tambahan Desa Sambangan. *Jurnal LPPM*, 13, 1–9.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.).

SAGE Publications.

- Dhio, M., Harahap, N., Syukri, M., Nst, A., Fadhilah, N., Hasibuan, A., ... & Siregar, S. (2024). Analisis pengelolaan keuangan pada industri pariwisata di Sumatera Utara (Studi kasus: Wisata Alam Syaakirah The View & Resto Desa Aek Sabaon, Kec. Marancar, Kab. Tapanuli Selatan). *MASMAN: Master Manajemen*, 2(4), 52–70.
- Hakim, M. I. (2025). Analisis kendala operasional travel umrah terkait visa, transportasi, akomodasi (Studi kasus PT. Arasy Bungo Mandiri). *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 3(1), 01–12. <https://doi.org/10.30983/krigan.v3i1.9457>
- Hidayah, C. H. (2022). *Manajemen risiko perusahaan tour dan travel PT Freshnel Kreasindo Perkasa Yogyakarta tahun 2022* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 1(2), 95–105. <https://doi.org/10.58784/rapi.65>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nazaruddin, N. (2019). *Analisis strategi pemasaran dan pelayanan dalam upaya peningkatan kualitas daya saing biro perjalanan haji dan umroh prospektif ekonomi syariah* [Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Nuraisi, S. Y. (2025). Analisis manajemen risiko operasional dan keuangan pada agen travel. *Jurnal Ilmiah*, 9, 41416–41425.
- Nurhasanah, F., & Syahputra, V. B. (2024). Pengelolaan keuangan bisnis. *JIEKA: Jurnal Integrasi Ekonomi, Keuangan, dan Akuntansi*, 1(1), 31–42.
- Rokhmah, D. A., Azizah, W., Rumeuw, S., & Pekalongan, U. K. H. A. W. (2023). Model bisnis travel haji syariah: Pendekatan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembiayaan dan layanan. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 7(1), 36–47.
- Seputro, H. Y., & Mustafida, E. F. (2024). Akuntabilitas pengelolaan keuangan wisata: Peran partisipasi masyarakat, kompetensi pengelola wisata, dan transparansi. *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 15(2), 57–68. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v15i2.3381>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriastuti, A., & Nugroho, H. (2025). Perancangan aplikasi pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan berbasis Microsoft Excel pada perusahaan jasa pengamanan: Studi kasus pada PT XYZ. In *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ*, 6.
- Tahulending, M., & Rondonuwu, S. N. (2022). Analisis pengendalian biaya operasional terhadap peningkatan laba pada CV. Kombos Tendean. *Jurnal LPPM Bidang EkoSusBudKum*, 6(1), 543–554.

- Ulya, E. R. (2019). Bidang investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 1–15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Widhiastuti, S. (2024). *Pengelolaan perencanaan keuangan: Strategi cerdas dan efektif mengubah keuangan Anda* (Vol. 1). Mega Press Nusantara.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.